

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di DKI Jakarta merupakan hak yang harus terpenuhi sebagai bagian dari warga negara demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih kelompok disabilitas melalui strategi dan program kerja yang dilakukan selama penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Strategi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan teori *political marketing* dengan mengacu pada konsep *positioning* menurut Newman dan Shet melalui empat pilihan strategi, diantaranya: strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan, dan strategi konfrontasi. Pegimplementasian strategi tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yang dianggap relevan untuk menyosialisasikan pemilu terhadap kelompok disabilitas.

#### **Strategi Penguatan**

Sosialisasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terhadap kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta pada praktiknya dilakukan dengan menguatkan sisi kelembagaan KPU Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara pemilu. Adapun implementasi tersebut dilakukan dengan melakukan penguatan melalui optimalisasi laman website dan media sosial resmi sebagai langkah untuk mempromosikan dan menyebarkan informasi seputar kepemiluan terhadap kelompok penyandang disabilitas. Selanjutnya KPU Provinsi DKI Jakarta

melakukan penguatan kelembagaan melalui kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga perhimpunan penyandang disabilitas di DKI Jakarta. KPU Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pengawasan dan perluasan sosialisasi melalui konsolidasi bersama KPU di tingkat kota administrasi untuk merealisasikan jalur-jalur komunikasi secara maksimal terhadap kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta. KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan penguatan di lapangan dengan menyediakan layanan yang aksesibel terhadap kelompok disabilitas. Tujuan penyediaan aksesibilitas ini untuk memudahkan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menyosialisasikan kepemiluan terhadap kelompok disabilitas.

Pada penerapannya, strategi ini cukup berpengaruh terhadap kinerja KPU Provinsi DKI Jakarta selama menyosialisasikan pemilu terhadap kelompok disabilitas. Hal tersebut dikarenakan penguatan dari sisi kelembagaan yang dilakukan baik dengan pembentukan kerjasama dengan organisasi penghimpun disabilitas maupun pemenuhan aksesibilitas dalam rangka memudahkan KPU Provinsi DKI Jakarta selama berlangsungnya proses penyelenggaraan pemilu terhadap kelompok disabilitas berjalan sesuai dengan rencananya. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan strategi ini yaitu adanya masalah koordinasi hingga ke elemen terbawah sehingga menyebabkan strategi ini belum merata terlaksana di beberapa lokasi.

#### Strategi Rasionalisasi

Pelaksanaan sosialisasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta melalui rasionalisasi pemilih dilakukan dengan memberikan pendidikan seputar kepemiluan terhadap kelompok penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk relawan demokrasi sebagai perpanjangan tangan KPU Provinsi DKI Jakarta selama pelaksanaan pendidikan pemilu. Selanjutnya KPU Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan institusi sosial yang khusus menghimpun kelompok disabilitas agar melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih di masing-masing tempat.

KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan pendidikan teknis pelaksanaan pemilu terhadap kelompok penyandang disabilitas untuk menyadarkan peran penting partisipan dari kelompok penyandang disabilitas selama penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Penerapan strategi ini cukup berpengaruh terhadap minat penyandang disabilitas selama penyelenggaraan pemilu yang dibuktikan dengan adanya peningkatan kesadaran memilih dari kalangan disabilitas. Kendala dari pelaksanaan strategi ini masih memerlukan banyak tenaga ahli yang professional dalam memberikan pendidikan politik terhadap kelompok disabilitas dan tata cara memperlakukan disabilitas selama pelaksanaan pemilu mengingat kelompok tersebut memerlukan perhatian bersifat khusus.

#### Strategi Bujukan

KPU Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan strategi bujukan melalui agenda sosialisasi yang bersifat hiburan. Tujuan kegiatan tersebut untuk membangun sosialisasi yang lebih menyenangkan juga sebagai langkah untuk menanamkan nilai-nilai dan persepsi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas. Selanjutnya KPU Provinsi DKI Jakarta menyediakan platform aplikasi yang didesain menarik agar meningkatkan daya tarik terhadap kelompok penyandang disabilitas. Penyediaan platform aplikasi ini pada praktiknya sudah cukup baik mengingat informasi dan tata cara pelaksanaan pemilu sudah disediakan secara rinci. Namun penggunaan platform tersebut hanya dapat dinikmati oleh beberapa ragam kelompok penyandang disabilitas seperti disabilitas fisik dan disabilitas mental mengingat dalam penggunaannya KPU Provinsi masih harus melakukan penyesuaian terhadap kelompok penyandang disabilitas lainnya seperti tuna netra.

Pelaksanaan strategi ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik tetapi belum begitu efektif diterapkan pada beberapa penyandang disabilitas seperti yang disebutkan sebelumnya mengingat masih banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan terhadap kelompok

penyandang disabilitas. Kendala dari pelaksanaan strategi ini yaitu belum bisa diterapkan pada seluruh golongan disabilitas.

### Strategi Konfrontasi

Sosialisasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di DKI Jakarta berjalan cukup efektif, namun pada pelaksanaannya KPU Provinsi DKI Jakarta sempat menemukan beberapa kelompok yang dianggap apatis baik dikarenakan faktor keluarga yang menutup-nutupi keberadaan mereka maupun dari adanya ketidakcocokan dengan pilihan kandidat. Maka strategi konfrontasi hadir sebagai upaya terakhir yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menyadarkan pemilih disabilitas yang dianggap apatis. Pengimplementasian sosialisasi tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi pintu ke pintu untuk meningkatkan optimalisasi sosialisasi terhadap kelompok penyandang disabilitas. KPU Provinsi DKI Jakarta mengamanatkan relawan demokrasi untuk melakukan sosialisasi tersebut sebagai upaya untuk mendorong partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas.

Pada praktiknya penerapan strategi ini kurang efektif dikarenakan mayoritas penyandang disabilitas di DKI Jakarta menyambut positif pelaksanaan pemilu dan sudah memiliki kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Kendala selama pelaksanaan strategi ini yaitu pelaksanaannya masih belum terkonsep mengingat penyandang disabilitas yang cenderung ditutupi oleh pihak keluarga masih menyulitkan relawan demokrasi untuk mengetahui keberadaannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, KPU Provinsi DKI Jakarta secara dominan memanfaatkan strategi penguatan terhadap kelembagaan dan strategi rasionalisasi selama pengimplementasian sosialisasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terhadap kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Strategi yang

dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta selama proses penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berhasil meningkatkan partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Adapun kendala dalam penelitian ini yaitu penulis belum menemukan rekapitulasi persentase jumlah perolehan suara kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya sebagai bahan perbandingan jumlah partisipan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan KPU Provinsi DKI Jakarta belum melakukan pemisahan data pemilih disabilitas dan non disabilitas pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.

## **V.2 Saran**

### **V.2.1 Saran Praktis**

1. KPU Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara pemilu perlu merealisasikan komunikasi dan sosialisasi yang lebih aksesibel melalui pemanfaatan media digital terhadap beragam kelompok penyandang disabilitas yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian.
2. KPU Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan identifikasi data secara akurat untuk pemilu periode berikutnya khususnya terhadap kelompok penyandang disabilitas yang kerap kali menjadi hambatan KPU Provinsi DKI Jakarta selama proses pendataan sosialisasi pemilu. Hal tersebut mengingat saat ini beberapa kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta yang memiliki hak pilih belum terdata secara optimal.
3. Selanjutnya KPU Provinsi DKI Jakarta diharapkan untuk terus meningkatkan koordinasi bersama lembaga-lembaga yang relevan dengan penyandang disabilitas untuk memaksimalkan jalur-jalur sosialisasi terhadap kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta.
4. Bagi PPUA Disabilitas yang berperan sebagai lembaga penghimpun kelompok penyandang disabilitas selama kegiatan pemilu diharapkan untuk terus mengembangkan kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif serta menjangkau massa dari kelompok disabilitas lebih luas. Hal tersebut

mengingat pentingnya pemenuhan hak dan memastikan keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan pemilu.

5. Bagi relawan demokrasi kelompok penyandang disabilitas yang berperan sebagai perpanjangan tangan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan dan melakukan pendidikan pemilu diharapkan dapat terus mengembangkan komunikasi secara persuasif guna meningkatkan ketertarikan kelompok penyandang disabilitas untuk memilih dalam kegiatan pemilu terutama mereka yang dianggap apatis.

### **V.2.2 Saran Teoritis**

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep *positioning* dari Newman & Shet sebagai alat bantu analisis. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait strategi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada kegiatan pemilu di periode yang akan datang, khususnya pada aspek yang berorientasi pada sisi kelemahan penerapan strategi sosialisasi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan pada teori penelitian yang digunakan, penulis belum mampu menjawab lebih rinci aspek-aspek yang mengarah pada sisi kelemahan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Adapun tujuan tersebut yaitu untuk melihat lebih jauh sudut pandang secara objektif yang dirasakan oleh kelompok penyandang disabilitas selaku penerima kebijakan strategi. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mencari informasi lebih detail terkait pengimplementasian strategi sosialisasi terhadap kelompok penyandang disabilitas yang dilakukan KPU di provinsi lain untuk membandingkan efektifitas yang dihasilkan dari pengimplentasian strategi sosialisasi oleh KPU Provisi DKI Jakarta.